



Tidak Heran

PENELITI Pusat Kajian Antikorrupsi (Pukat) Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman menguraikan, sebenarnya tidak heran jika KPK melakukan penindakan di DIY. Ia menilai, DIY

memang dianggap sebagai salah satu daerah maju dari sisi reformasi birokrasi.

Capaian kinerjanya pun tidak main-main. Apalagi, Kota Yog-

● ke halaman 11

Tidak Heran

● Sambungan Hal 1

Yogyakarta sudah berulang kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Capaian kinerja seperti itu belum menjamin kota ini bersih dari korupsi. Dugaan korupsi di Yogyakarta kan sudah ada dari dulu dan sudah ada laporan yang masuk ke KPK," katanya, Jumat (3/6).

Zaenur mengungkapkan, sudah tidak menjadi hal yang mengherankan apabila ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat di Yogyakarta. Sebab, memang banyak kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK dari Yogyakarta.

Zaenur juga menjelaskan, ada beberapa pola korupsi di tingkat daerah yang sudah banyak terbaca modus dan alurnya. "Pertama, ya, modus suap dalam perizinan. Untuk dapat izin tertentu, pemohon izin bakal memberikan sejumlah uang pejabat daerah agar izinnya segera keluar," paparnya.

Modus kedua, terkait pengadaan barang dan jasa. Paket pengadaan barang dan jasa dijual ke penyedia namun harus memberikan cashback dalam bentuk suap atau gratifikasi. Sedangkan, modus ketiga adalah pengisian jabatan di daerah. Untuk bisa menduduki jabatan, maka pelaku memberikan suap kepada pejabat daerah.

"Bisa juga, kasus korupsi terjadi bila ada sebuah pemberian sebagai kelan-

jutan dari perbuatan yang sebelumnya atau pemberian sebelumnya. Pemberian bisa dilakukan dan berlanjut meski pejabat sudah selesai menjabat," tandasnya.

Lokasi apartemen

Berdasarkan pantauan *Tribun Jogja*, lahan yang rencananya akan dibangun Apartemen Sekar Kedhaton adalah tanah *hook* yang hanya berjarak sekitar 500-700 meter ke timur dari kawasan Malioboro. Papan penanda pemilik dari lahan itu sudah lapuk. Tulisannya nyaris tidak terlihat. Lahan itu dijadikan tempat parkir para wisatawan Malioboro oleh warga sekitar.

Berdasarkan sumber yang didapat *Tribun Jogja* di lapangan, luas lahan yang rencananya dijadikan apartemen itu sekitar 5.979 meter persegi. Selama ini yang membersihkan lahan tersebut adalah warga sekitar di Jalan Kemertiran Lor.

Beberapa warga sekitar sebenarnya terbantu dengan keberadaan lahan tersebut. Sebab beberapa tahun terakhir, mereka mendapat pekerjaan baru yakni membersihkan lahan yang akan dijadikan apartemen Royal Kedhaton itu. Sejumlah uang jasa kebersihan pun rutin dikirimkan oleh pemilik lahan kepada beberapa warga di sana.

LHKPN

Haryadi Suyuti tercatat memiliki utang sekitar Rp1,1 miliar. Catatan utang tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Haryadi kepada KPK tera-

khir kali pada 31 Maret 2021 untuk laporan periodik 2020.

Dari pendalaman *Tribun*, Haryadi Suyuti tercatat memiliki tujuh aset tanah dan bangunan yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul dengan nilai variatif, dari yang termurah senilai Rp320 juta hingga termahal Rp1,5 miliar. Bila dijumlahkan, nilai seluruh aset tersebut mencapai Rp6,32 miliar.

Tak hanya itu, Haryadi tercatat memiliki empat unit motor Piaggio yang terdiri dari Piaggio tahun 2011 senilai Rp6,5 juta; tahun 2011 senilai Rp4 juta; tahun 2014 senilai Rp7,5 juta; dan tahun 2015 senilai Rp7,5 juta. Motor lainnya yang dia miliki yakni Honda CB tahun 2011 senilai Rp25 juta; Honda PCX tahun 2017 senilai Rp21,5 juta; Yamaha N-Max tahun 2017 senilai Rp15,6 juta; dan Honda Forza tahun 2018 senilai Rp24,5 juta.

Haryadi diketahui memiliki mobil Toyota Alphard tahun 2012 senilai Rp200 juta dan Ford Fiesta tahun 2015 senilai Rp87,5 juta. Bila ditotal, nilai kepemilikan kendaraan Haryadi mencapai sekitar Rp399,6 juta.

Haryadi Suyuti juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp4.817.050.000; kas dan setara kas senilai Rp185 juta; serta harta lainnya sebesar Rp5,75 juta. Dia tidak memiliki surat berharga, tapi memiliki utang sebesar Rp1.183.200.000. Bila dikalkulasikan seluruhnya, total harta kekayaan Haryadi mencapai Rp10.551.200.000. (ard/hda/Tribun Network)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005